



MODAL SOSIAL DAN KEMANDIRIAN: MENAKAR DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BONGOIME KABUPATEN BONE BOLANGO

¹Saleh Al Hamid, ²Fitriani Abdulah

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri
Gorontalo, Kota Gorontalo
salehalhamid@ung.ac.id

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri
Gorontalo, Kota Gorontalo
frnbdllah@gmail.com

*Received 1 January 2026; Revised: 3 January 2026; Accepted: 15 January 2026; Published: 20 January 2026; Available online:
January 2026*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak jangka panjang Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap modal sosial dan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berhasil membangun modal sosial struktural, yang memperluas akses KPM ke dalam jaringan kelembagaan desa. Program juga terbukti efektif dalam meningkatkan modal manusia generasi penerus melalui peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, modal sosial yang terbentuk bersifat statis dan belum bertransformasi menjadi modal sosial kognitif seperti kepercayaan dan kolaborasi yang dapat mendorong inisiatif kolaborasi ekonomi mandiri antar-KPM. Kemandirian ekonomi orang tua belum tercapai karena didominasi oleh ketidakpastian penyaluran bantuan serta desain program yang kurang menyentuh peningkatan kapasitas produktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengungkap adanya "mekanisme yang hilang", yaitu pendampingan transformatif dan integrasi program pemberdayaan ekonomi, dalam konversi bantuan sosial menjadi kemandirian berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan stabilisasi sistem penyaluran bantuan, reorientasi peran pendamping sebagai fasilitator pemberdayaan, dan kesinergian PKH dengan program penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Kata Kunci: Modal Sosial; Kemandirian; Dampak Jangka Panjang; Program Keluarga Harapan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the long-term impact of the Family Hope Program (PKH) on the social capital and economic independence of beneficiary families (KPM) in Bongoime Village, Bone Bolango Regency. The study used a qualitative approach with a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and focus group discussions (FGDs). The results indicate that PKH successfully built structural social capital, expanding beneficiary families' access to village institutional networks. The program also proved effective in enhancing the human capital of the next generation by improving access to education and health services. However, the social capital formed was static and had not yet transformed into cognitive social capital, such as trust and collaboration, that could foster collaborative economic independence initiatives among beneficiary families. Parents' economic independence has not been achieved due to the uncertainty of aid distribution and a program design that does not adequately address productive capacity building. The study concludes that there is a "missing mechanism," namely transformative mentoring and the integration of economic empowerment programs, in converting social assistance into sustainable independence. This study recommends stabilization of the aid distribution system, reorientation of the role of facilitators as empowerment facilitators, and synergy between PKH and local economic capacity strengthening programs.

Keywords: *Social Capital; Independence; Long-Term Impact; Family Hope Program.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan sebagai masalah multidimensi tetap menjadi fokus kebijakan strategis di Indonesia, dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen utama perlindungan sosial yang terus mengalami evaluasi dan penyempurnaan. Program bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) ini secara desain bertujuan untuk mencapai tujuan ganda: menyangga konsumsi rumah tangga miskin sekaligus berinvestasi pada modal manusia generasi penerus melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan (Economic Policy Research Institute, 2024). Namun, dalam perjalanannya, pertanyaan kritis terus mengemuka mengenai kemampuan program ini dalam mendorong lompatan menuju kemandirian ekonomi—sebuah

kondisi dimana rumah tangga tidak hanya terbebas dari kemiskinan moneter, tetapi juga memiliki ketahanan dan kapasitas untuk mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan tanpa ketergantungan permanen pada bantuan pemerintah. Evaluasi yang ada sering kali terbatas pada aspek administratif dan pencapaian indikator output jangka pendek, sementara analisis mendalam tentang bagaimana program membentuk kapasitas sosial-ekonomi rumah tangga dalam perspektif jangka panjang masih terbatas. Penelitian ini menyajikan novelti melalui reposisi fokus evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), dari sekadar analisis dampak finansial jangka pendek menuju ekspansi mendalam mengenai konstruksi modal sosial dan manifestasi kemandirian berkelanjutan dalam

kerangka temporal jangka panjang, yang dikontekstualisasikan dalam setting spesifik Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango.

Studi ini mengatasi *gap* literatur dengan menerapkan pendekatan kualitatif-etnografis untuk mengungkap dinamika interaksi antara mekanisme PKH dan nilai-nilai sosio-kultural lokal (*huyula*), serta bagaimana interaksi tersebut merekonfigurasi struktur modal sosial (*bridging, bonding, linking*) dan selanjutnya mentransformasikannya menjadi kapasitas kemandirian komunitas yang holistik—melampaui aspek ekonomi hingga mencakup dimensi agensi dan ketahanan kolektif. Dengan menekankan analisis pada kontekstualisasi dampak, evolusi pasca-keanggotaan, serta peningkatan kapasitas kolektif sebagai ultimate outcome, penelitian ini memberikan kontribusi perspektif baru dalam mengukur efektivitas program perlindungan sosial yang bersifat transformatif dan berkelanjutan.

Konsep modal sosial dinilai semakin relevan sebagai lensa untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama dalam konteks kebijakan sosial yang berkelanjutan. Modal sosial, yang direpresentasikan melalui jaringan, kepercayaan, dan norma reciprocitas yang memfasilitasi aksi kolektif, diakui sebagai fondasi penting bagi penguatan ketahanan komunitas dan

pemberdayaan ekonomi (Smith, 2025).

Penggunaan lensa modal sosial—yang merujuk pada jaringan, kepercayaan, norma, dan nilai yang memfasilitasi kerjasama kolektif—sebagai alat analisis untuk menakar dampak jangka panjang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual, di mana keberhasilan program tidak hanya diukur melalui peningkatan modal manusia individu (seperti partisipasi sekolah dan kesehatan), tetapi juga melalui interaksinya dengan struktur sosial komunitas. Melalui lensa ini, dampak jangka panjang PKH berpotensi diperkuat atau justru dilemahkan oleh dinamika modal sosial yang ada; misalnya, jaringan kekerabatan (*pohutu'ala*) dan nilai-nilai lokal Gorontalo yang kuat dapat berfungsi sebagai media penyebaran norma positif tentang pendidikan dan kesehatan, sementara tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap fasilitator dan institusi dapat menentukan kepatuhan terhadap program. Di sisi lain, PKH juga berpotensi mengubah lanskap sosial dengan mempengaruhi solidaritas komunitas—baik dengan memperkuat kohesi melalui pemberdayaan maupun berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial jika implementasinya dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, keberlanjutan

pemutusan rantai kemiskinan di Bongoime sangat bergantung pada sejauh mana PKH mampu bersinergi dengan, memanfaatkan, dan pada akhirnya memperkuat modal sosial bawaan desa, sehingga tidak hanya menciptakan individu yang lebih berpendidikan dan sehat, tetapi juga komunitas yang lebih kohesif, saling percaya, dan mampu mengorganisir diri untuk pembangunan kolektif di masa depan.

Mekanisme PKH, yang mensyaratkan kehadiran dalam pertemuan kelompok dan interaksi rutin dengan pendamping serta sesama penerima, secara potensial menciptakan ruang bagi penguatan modal sosial ini. Interaksi yang terstruktur tersebut dapat *membangun bonding social capital* yang solid antar anggota kelompok, serta sekaligus berfungsi sebagai jembatan (*bridging/linking social capital*) untuk mengakses informasi, pelatihan, dan jaringan dari institusi di luar komunitas mereka. Penguatan kedua bentuk modal sosial ini diduga kuat menjadi jalur kritis (*critical pathway*) yang menghubungkan intervensi bantuan tunai dengan hasil pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan, termasuk kemandirian ekonomi.

Studi-studi terkini mulai menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh faktor non-moneter seperti kohesi sosial dan

kapasitas kolektif komunitas (Mahapatro et al., 2025).

Penggunaan lensa modal sosial – yang merujuk pada jaringan, kepercayaan, norma, dan nilai yang memfasilitasi kerjasama kolektif – sebagai alat analisis untuk menakar dampak jangka panjang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual, di mana keberhasilan program tidak hanya diukur melalui peningkatan modal manusia individu (seperti partisipasi sekolah dan kesehatan), tetapi juga melalui interaksinya dengan struktur sosial komunitas. Melalui lensa ini, dampak jangka panjang PKH berpotensi diperkuat atau justru dilemahkan oleh dinamika modal sosial yang ada; misalnya, jaringan kekerabatan (*Pohutu'ala*) dan nilai-nilai lokal Gorontalo yang kuat dapat berfungsi sebagai media penyebaran norma positif tentang pendidikan dan kesehatan, sementara tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap fasilitator dan institusi dapat menentukan kepatuhan terhadap program. Di sisi lain, PKH juga berpotensi mengubah lanskap sosial dengan mempengaruhi solidaritas komunitas – baik dengan memperkuat kohesi melalui pemberdayaan maupun berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial jika implementasinya dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, keberlanjutan pemutusan rantai kemiskinan di

Bongoime sangat bergantung pada sejauh mana PKH mampu bersinergi dengan, memanfaatkan, dan pada akhirnya memperkuat modal sosial bawaan desa, sehingga tidak hanya menciptakan individu yang lebih berpendidikan dan sehat, tetapi juga komunitas yang lebih kohesif, saling percaya, dan mampu mengorganisir diri untuk pembangunan kolektif di masa depan.

Studi-studi terdahulu tentang PKH menunjukkan temuan yang beragam. Di satu sisi, penelitian di berbagai lokasi seperti di Desa Tombulilato (Mokodompit, 2019), Desa Randuboto (Fahim, 2022), dan Desa Rao-Rao Dolok (Adanan & Nasution, 2024) mengonfirmasi bahwa PKH memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan, konsumsi, dan akses layanan dasar keluarga penerima. Namun, temuan lain mengindikasikan bahwa dampak program terhadap kemandirian ekonomi masih terbatas. Penelitian di Desa Toman (Sidik & Rianas, 2022) dan oleh Fawanmele et al., (2025) di Kepulauan Tanimbar menunjukkan kecenderungan pemanfaatan dana PKH yang masih bersifat konsumtif serta belum optimal dalam menciptakan kemandirian berkelanjutan. Perspektif ekonomi Islam dalam beberapa kajian (Patimbangi & Amir, 2025; Islamiyati & Restuti, 2024; Abiyani & Setyowati, 2025) menekankan pentingnya prinsip

keadilan, pemberdayaan (ikhtiar), dan penghindaran dari ketergantungan (ittikal) dalam pemberian bantuan, sekaligus mengkritik jika bantuan hanya menjadi rutinitas yang tidak transformatif. Hasil penelitian oleh Fithaloka, et al., (2024). menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tampan belum optimal, hal ini terutama disebabkan oleh kualitas data BDT yang tidak mutakhir, sehingga menghambat penjangkauan penerima manfaat. Akibatnya, cakupan bantuan sangat terbatas karena jumlah KPM belum mencapai separuh dari total penduduk miskin di kecamatan tersebut. Oleh karena itu, PKH belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan memerlukan perbaikan sistem pendataan serta perluasan cakupan.

Riset-riset terkini juga mulai menyoroti dimensi pemanfaatan dan pengelolaan bantuan. Hermawati et al., (2024) dan Harahap (2023) menekankan analisis pemanfaatan bantuan untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan pentingnya pendekatan berbasis sumber daya. Sementara itu, studi oleh Fitrawati & Mardiana (2023) dan Karimah (2023) menggarisbawahi peran tata kelola dan faktor lokal dalam menentukan hasil program. Akhmadi et al., (2023) secara khusus menemukan bahwa dampak PKH terhadap

kemandirian rumah tangga bersifat dinamis dan memerlukan waktu, mengisyaratkan perlunya analisis jangka panjang. Hasil penelitian oleh Hasanah & Jannah (2025), menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna belum maksimal dikarenakan upaya penyadaran yang masih kurang optimal dengan masyarakat yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, kegiatan yang tidak berkelanjutan dalam tahap pengkapasitasan, dan kurangnya bimbingan teknis terhadap masyarakat. Hal ini di pengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia tentang teknologi tepat guna, dan keterbatasan fasilitas teknologi tepat guna, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi yang masih kurang intens, sehingga perlu diterapkannya teknologi dalam kegiatan, kepemimpinan yang baik, komunikasi yang mengedepankan budaya masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang baik.

Meskipun banyak kajian telah dilakukan, terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait analisis sistematis mengenai interaksi antara modal sosial yang terbentuk melalui PKH dengan pencapaian kemandirian ekonomi jangka panjang di tingkat komunitas desa. Konteks lokasi yang spesifik sangat menentukan,

karena keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan kelembagaan setempat (Sumakul, Kerebunu, & Salem, 2025; Septiana, Dzaki, & Sanjaya, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKH telah berjalan cukup lama, sehingga memungkinkan untuk mengkaji dampak jangka panjangnya, serta karakteristik masyarakatnya yang potensial untuk dikaji dinamika modal sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul “Modal Sosial dan Kemandirian: Menakar Dampak Jangka Panjang Program Keluarga Harapan bagi Keluarga di Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango” menjadi penting untuk dilakukan. Pentingnya penelitian ini adalah: Pertama, untuk memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana program bantuan sosial nasional seperti PKH mampu menumbuhkan aset non-material (modal sosial) yang berkelanjutan; Kedua, untuk menganalisis kausalitas antara penguatan modal sosial dengan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat dalam perspektif jangka panjang; Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi perumusan kebijakan PKH fase berikutnya, khususnya dalam mendesain intervensi yang

lebih efektif untuk memperkuat dimensi pemberdayaan dan kemandirian, serta bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program komplementer; Keempat, mengisi kekosongan literatur akademik dengan menyajikan studi mendalam tentang mekanisme transformatif PKH di tingkat desa, melampaui sekadar pengukuran output jangka pendek.

METODE

Penelitian ini didesain sebagai studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pemahaman holistik mengenai makna, proses, dan pengalaman subjektif dari para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks komunitas spesifik di Desa Bongoime (Creswell & Poth, 2018). Fokus penelitian adalah mengeksplorasi dampak jangka panjang program terhadap konstruksi modal sosial dan tingkat kemandirian keluarga, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas dinamika sosial yang tidak terukur secara kuantitatif.

Informan penelitian terdiri dari Kepala Keluarga dan/atau Ibu Rumah Tangga dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah menerima bantuan minimal selama 5 (lima) tahun dan dianggap telah memasuki atau menyelesaikan fase akhir program.

Jumlah informan adalah 12 orang dari Keluarga Penerima Manfaat, satu orang Pendamping PKH dan 2 orang Aparat Desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan rekomendasi dari Pendamping PKH dan perangkat desa, dengan kriteria utama yaitu dianggap mengalami perubahan signifikan – baik menuju kemandirian maupun mengalami stagnasi.

Teknik *snowball sampling* kemudian diterapkan untuk menemukan informan kunci lain yang relevan. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku di awal, tetapi mengikuti prinsip kejenuhan data, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi baru yang diperoleh tidak lagi memberikan variasi atau tema baru yang substantif (Saunders et al., 2018). Karakteristik demografis informan seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama partisipasi dalam PKH didokumentasikan secara rinci untuk memberikan konteks analitis yang kaya.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang berfokus pada pengalaman partisipan dalam program, perubahan pola hubungan sosial

(jaringan, kepercayaan, norma timbal balik), dan upaya-upaya pencapaian kemandirian ekonomi dan sosial.

Data dari wawancara dilengkapi dengan observasi informan dalam kegiatan kelompok PKH dan aktivitas komunitas, serta studi dokumen terhadap data monografi desa dan arsip program. Sebagai pelengkap, dilakukan satu sesi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan perwakilan KPM, tokoh masyarakat, dan pendamping PKH untuk mendiskusikan persepsi kolektif mengenai dampak program.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan iteratif mengikuti model analisis tematik reflektif yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2022). Prosesnya dimulai dengan transkripsi dan pembiasaan terhadap data, dilanjutkan dengan pembuatan kode awal secara sistematis. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan dan direview untuk mengembangkan tema-tema potensial yang menjawab pertanyaan penelitian. Tema-tema akhir didefinisikan, diorganisir, dan dilaporkan secara naratif dengan disertai kutipan ilustratif langsung dari partisipan. Untuk memastikan keabsahan temuan, diterapkan teknik triangulasi sumber dan metode, pengecekan anggota, serta penyediaan deskripsi kontekstual yang mendalam agar pembaca dapat menilai keteralihan temuan (Creswell & Poth, 2018). Seluruh

proses pengambilan keputusan metodologis dan analitis didokumentasikan dalam *audit trail* untuk memastikan akuntabilitas penelitian. Lokasi penelitian di Desa Bongoime Kabupaten Bone Bolango, dan waktu penelitian selama 3 bulan yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2025.

PEMBAHASAN

Modal Sosial dan Kemandirian dalam Program Keluarga Harapan

Penelitian ini mengungkap sebuah narasi yang kompleks mengenai perjalanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime. Kisahnya bukanlah cerita hitam-putih tentang keberhasilan atau kegagalan, melainkan sebuah lukisan detail tentang capaian, tantangan, dan paradoks yang muncul dari intervensi kebijakan sosial di tingkat akar rumput. Inti dari narasi ini adalah temuan tentang terbanggunya jembatan modal sosial struktural yang ternyata belum sampai ke seberang kemandirian ekonomi yang diharapkan.

Awal cerita dimulai dengan sebuah capaian yang signifikan. PKH telah berhasil membangun dan memperkuat modal sosial struktural bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelum program ini berjalan, banyak dari KPM mungkin hanya terlibat dalam interaksi sosial yang terbatas pada lingkaran keluarga atau tetangga terdekat. Kehadiran PKH secara

sistematis membuka akses mereka ke dalam forum-forum kelembagaan formal desa. Mereka menjadi rajin hadir dalam pertemuan kelompok P2K2, aktif di kegiatan posyandu, dan mulai memiliki jalur komunikasi yang lebih terstruktur dengan perangkat desa.

Secara sederhana, PKH telah memperluas peta jaringan sosial resmi KPM. Mereka tidak lagi sepenuhnya terpinggirkan dari ruang-ruang publik desa. Temuan ini memberikan konfirmasi optimistis awal bahwa program mampu menciptakan keterhubungan kelembagaan, selaras dengan studi-studi terdahulu yang menekankan pentingnya tata kelola dan partisipasi lokal. Namun, narasi mulai berbelok ketika kita menelisik lebih dalam tentang kualitas dari keterhubungan ini dan tujuannya. Di sinilah letak temuan krusial penelitian modal sosial struktural yang terbangun itu bersifat statis dan belum bertransformasi menjadi modal sosial kognitif yang dinamis. Apa artinya, KPM hadir di pertemuan, tetapi interaksi yang terjadi didominasi oleh hubungan vertikal antara pendamping sebagai "penyalur aturan" dan KPM sebagai "pemenuh kewajiban". Pertemuan lebih banyak diisi dengan sosialisasi jadwal, pengisian formulir, dan pemantauan administrasi seperti kehadiran sekolah dan kesehatan. Ruang untuk diskusi horizontal

antar-KPM tentang peluang usaha, berbagi keterampilan, atau membangun rasa percaya untuk kerjasama ekonomi hampir tidak tersentuh. Modal sosial yang terbentuk adalah modal sosial "perintah dan laporan", bukan modal sosial "diskusi dan kolaborasi". Akibatnya, kohesi sosial yang seharusnya menjadi motor penggerak inisiatif mandiri justru tidak pernah terpupuk. Jembatan telah dibangun, tetapi di ujung jembatan itu tidak ada jalan menuju proyek ekonomi bersama.

Faktor lain yang secara konsisten meruntuhkan pondasi kemandirian adalah ketidakpastian administratif, terutama dalam hal waktu pencairan bantuan. Narasi dari para KPM dipenuhi dengan kecemasan yang berulang: "Bantuan katanya bulan ini, tapi kok belum cair juga? Uang untuk beli seragam anak dan bayar listrik sudah habis." Ketidakpastian ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan penghambat psikologis dan perilaku yang sangat kuat. Dari perspektif ekonomi perilaku, kondisi ini membuat KPM terus terjebak dalam pola pikir "hari ini". Mereka sulit diajak merencanakan untuk minggu depan, apalagi untuk bulan depan, karena sumber daya inti mereka – bantuan PKH – datangnya tidak bisa diprediksi. Kebiasaan menabung, yang merupakan dasar pertama kemandirian keuangan, menjadi hampir mustahil dibangun. Dana bantuan, ketika datang, langsung

diserap untuk menutupi kebutuhan konsumtif yang sudah tertunda atau menggonggosi utang yang muncul akibat keterlambatan itu. Dengan demikian, bantuan itu sendiri direduksi maknanya menjadi sekadar tambal-sulam cash flow keluarga, bukan modal yang bisa dialokasikan untuk hal produktif. Pola ketergantungan pun tak terelakkan, karena hidup mereka secara nyata bergantung pada ketepatan waktu sebuah transfer bank dari pemerintah.

Di tengah paradoks ini, muncul sebuah narasi keberhasilan yang lebih jelas dan memberikan harapan: pembangunan modal manusia generasi penerus. Inilah sisi PKH yang paling bersinar di Bongoime. Bantuan tunai bersyarat itu terbukti efektif menjadi kunci yang membuka akses anak-anak dari keluarga miskin ke pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Orang tua termotivasi memenuhi kewajiban menyekolahkan anak dan membawa mereka ke posyandu karena ada insentif finansial langsung. Hasilnya terlihat dalam data kehadiran sekolah yang meningkat dan catatan kesehatan anak yang lebih terpantau. Narasi ini sejalan dengan banyak penelitian lain yang menegaskan peran PKH sebagai jaring pengaman sosial yang berhasil. Program ini telah mengamankan masa depan anak-anak, dengan harapan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan punya peluang mobilitas

sosial yang lebih baik daripada orang tua mereka. Ini adalah investasi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan antar-generasi.

Namun, fokus pada generasi penerus ini justru menguak sebuah ketimpangan dampak dalam waktu. Sementara anak-anak disiapkan untuk masa depan, kapasitas ekonomi orang tua di masa kini justru stagnan. Desain PKH tidak menyentuh langsung aspek peningkatan keterampilan (skill) orang tua, akses ke lapangan kerja, atau permodalan usaha. Orang tua berperan sebagai "saluran" bantuan untuk anak, tetapi kapabilitas produktif mereka sendiri tidak beranjak. Mereka tetap bergantung pada pekerjaan serabutan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup, dan berpenghasilan rendah. Hal ini menciptakan sebuah dualisme yang menarik: PKH sukses sebagai program penyelamat (rescue) untuk anak-anak, tetapi gagal sebagai program pengangkat (lift) bagi orang tua. Program berfungsi optimal sebagai jaring pengaman sosial, namun belum mampu bertransformasi menjadi tangga mobilitas sosial.

Ketika temuan-temuan di Bongoime ini, dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, terjadilah sebuah dialog akademik yang memperkaya. Narasi tentang efektivitas bantuan dalam meningkatkan akses layanan dasar di Bongoime sejalan dengan temuan Mokodompit

(2019) atau Fahim (2022). Sementara itu, kegelisahan tentang ketergantungan dan belum lahirnya kemandirian di Bongoime menemukan kesamaan dalam analisis kritis Sidik & Rianas (2022) dan Fawanmele dkk. (2025). Lebih dalam lagi, kritik dari perspektif ekonomi Islam oleh Patimbangi & Amir (2025) mengenai pentingnya menghindari ketergantungan dan mendorong ikhtiar untuk mendapatkan bukti empirisnya di sini. Pola yang terlihat justru kebalikannya: bantuan yang rutin tanpa diikuti lompatan menuju usaha mandiri.

Penelitian di Bongoime memberikan kontribusi orisinal dengan mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan "mekanisme yang hilang" dalam implementasi program. Temuan ini mengungkap bahwa akar hambatan bukan terletak pada aspek pendanaan atau motivasi semata, melainkan pada desain interaksi dan kelembagaan program yang tidak dirancang untuk memfasilitasi pendampingan yang seharusnya mendorong perubahan pola pikir peserta, dari sekadar menunggu bantuan menjadi mampu merencanakan masa depan usahanya sendiri.

Peran pendampingan yang idealnya berfungsi sebagai jembatan transformatif dari ketergantungan menuju kemandirian, dalam praktiknya justru tereduksi menjadi fungsi pengawasan administratif.

Frekuensi pertemuan yang tidak teratur serta muatan materi yang kurang relevan dengan pengetahuan praktis-produktif menyebabkan hilangnya momentum kritis untuk perubahan perilaku. Ditinjau dari konteks lokal Bongoime, di mana karakteristik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didominasi oleh tingkat pendidikan rendah dan pola usaha subsisten, temuan ini semakin mengonfirmasi bahwa pendekatan generik (*one-size-fits-all*) dari program nasional gagal menjangkau akar permasalahan spesifik yang ada di tingkat komunitas.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak diakhiri dengan simpulan yang pesimistis, melainkan dengan rangkaian pembelajaran untuk perbaikan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime telah membangun fondasi penting berupa modal sosial melalui jaringan, akses layanan bagi anak, dan bantuan keuangan berkala. Namun, fondasi tersebut belum cukup untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Diperlukan penguatan lebih lanjut melalui elemen-elemen yang selama ini masih kurang.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya integrasi PKH dengan program pemberdayaan lain, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan mikro. Selain itu, sistem penyaluran bantuan harus distabilkan guna memberikan

kepastian bagi penerima. Yang tak kalah penting, peran pendamping perlu diubah secara mendasar—dari sekadar pelaksana administrasi menjadi fasilitator yang membangun kepercayaan, menghubungkan ide, serta menjembatani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan sumber daya ekonomi lokal. Hanya dengan mengisi kesenjangan antara modal sosial struktural dan kognitif, serta antara bantuan konsumtif dan peningkatan kapasitas produktif, pelaksanaan PKH di Bongoime—dan mungkin juga di lokasi lain—dapat mencapai hasil yang diharapkan: tidak sekadar membantu keluarga secara langsung, tetapi menciptakan keluarga yang benar-benar berdaya dan mandiri.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime, Kabupaten Bone Bolango, memberikan dampak kompleks dan berlapis terhadap modal sosial serta kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dampak yang teramati menunjukkan bahwa pencapaian lebih signifikan pada penguatan modal manusia dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan peningkatan kemandirian ekonomi orang tua dalam jangka pendek.

Pertama, program ini berhasil membangun modal sosial struktural dengan signifikan. PKH telah memperluas akses KPM ke dalam jaringan kelembagaan formal desa (seperti P2K2 dan Posyandu), mengurangi keterpinggiran sosial, dan menciptakan keterhubungan vertikal antara penerima dengan perangkat desa dan pendamping. Namun, modal sosial yang terbangun bersifat statis dan administratif, didominasi oleh hubungan perintah-pemenuhan kewajiban. Program gagal mentransformasikannya menjadi modal sosial kognitif yang dinamis, seperti kepercayaan, norma timbal balik, dan jejaring kolaborasi horizontal antar-KPM yang esensial untuk memicu inisiatif ekonomi bersama.

Kedua, tujuan kemandirian ekonomi KPM belum tercapai. Ketidakpastian waktu pencairan bantuan menciptakan ketergantungan psikologis dan perilaku, menjebak KPM dalam pola pikir jangka pendek dan menghambat pembangunan kebiasaan menabung atau perencanaan keuangan. Bantuan lebih berfungsi sebagai penambal defisit arus kas konsumtif ketimbang modal produktif. Selain itu, desain program yang berfokus pada pemenuhan syarat kesehatan

dan pendidikan anak tidak disertai dengan intervensi untuk meningkatkan kapasitas produktif orang tua, seperti pelatihan keterampilan, akses ke lapangan kerja, atau permodalan usaha.

Ketiga, pencapaian PKH yang paling nyata dan menjanjikan justru terletak pada pembangunan modal manusia generasi penerus. Program terbukti efektif sebagai jaring pengaman sosial yang meningkatkan akses anak-anak pada pendidikan dan layanan kesehatan dasar, menanamkan fondasi untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Namun, hal ini menciptakan dualisme dampak kesuksesan sebagai program rescue (penyelamat) bagi anak-anak, namun kegagalan sebagai program lift (pengangkat) bagi orang tua.

Secara keseluruhan, penelitian di Desa Bongoime mengungkap adanya "mekanisme yang hilang" dalam mata rantai dari bantuan sosial menuju kemandirian. Mekanisme tersebut adalah pendampingan transformatif dan desain kelembagaan yang mampu mengonversi modal sosial struktural menjadi kognitif seperti aspek-aspek tidak berwujud menjadi nilai-nilai bersama, norma, tujuan yang sama, dan

pemahaman yang sama di antara anggota kelompok serta menggunakan struktur yang ada misalnya, pertemuan rutin, tim proyek sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, komunikasi terbuka, dan visi bersama, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas kolektif kelompok tersebut.

Dengan cara tersebut, orang-orang dalam jaringan mulai berpikir dan merasakan hal yang sama serta mengintegrasikan bantuan tunai dengan peningkatan kapasitas ekonomi produktif KPM. Tanpa mekanisme ini, PKH berisiko hanya memelihara ketergantungan dalam jangka pendek sambil menunggu hasil investasi modal manusia di masa depan yang masih jauh.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan studi lebih mendalam untuk merancang dan menguji model pendampingan yang transformatif, yang menggeser peran pendamping dari administrator menjadi fasilitator pemberdayaan. Model ini harus mencakup modul pelatihan soft skill, manajemen keuangan rumah

tangga, dan fasilitasi pembentukan kelompok usaha berbasis kepercayaan antar-KPM.

2. Melaksanakan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) bersama KPM dan pendamping untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, kebutuhan keterampilan spesifik, serta merancang skema akses permodalan mikro yang sesuai dengan konteks Desa Bongoime. Penelitian ini bertujuan menciptakan prototipe program integratif antara PKH dan pemberdayaan ekonomi.
3. Melakukan studi komparatif dengan desa lain yang memiliki karakteristik berbeda untuk melihat variasi dampak dan "mekanisme yang hilang". Selain itu, diperlukan studi longitudinal yang secara empiris melacak mobilitas sosial anak-anak penerima manfaat PKH setelah dewasa, guna benar-benar mengukur dampak jangka panjang investasi modal manusia tersebut.
4. Mensintesis temuan penelitian menjadi policy brief yang konkret untuk diadvokasikan kepada pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan nasional. Rekomendasi kunci meliputi:

(a) stabilisasi sistem penyaluran bantuan, (b) integrasi PKH dengan program pelatihan vokasi dan kewirausahaan dari kementerian/lembaga lain, dan (c) revisi indikator kinerja pendamping yang memasukkan unsur pemberdayaan ekonomi dan penguatan modal sosial kognitif.

Dengan demikian, gagasan selanjutnya tidak hanya berhenti pada analisis akademis, tetapi bergerak ke arah penelitian terapan dan advokasi yang bertujuan langsung untuk mengisi kesenjangan antara modal sosial dan kemandirian dalam program-program bantuan sosial di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyani, E., & Setyowati, E. (2025). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan Berdasar Prinsip Keadilan dalam Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 168–180.
- Adanan, Y. A. H. D. H., & Nasution, M. (2024). Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rao-Rao Dolok Kecamatan Sosa. *Journal of Islamic Business Management*, 3(2).

- Akhmadi, M. H., Khilyati, N., & Wati, E. N. (2023). Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Rumah Tangga Di Desa Plosojenar 2016-2022. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 92-101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Economic Policy Research Institute. (2024, 29 Oktober). Laporan akhir studi kasus kontribusi Tim Kebijakan TNP2K terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia [Laporan untuk Proaktif]. TNP2K. <https://media.neliti.com/media/publications/639867-studi-kasus-kontribusi-tim-kebijakan-tnp-cc5e8070.pdf>
- Fahim, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Qiema* (Qomaruddin Islamic Economics Magazine), 8(2), 120-139.
- Fithaloka, A. A., Bayzura, N., & Fajri, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH): Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).
- Fawanmele, Y., Sairmaly, F. A., & Batkunde, L. (2025). Pengaruh Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Jemaah Islamiah*, 1(3), 72-79.
- Fitrawati, F., & Mardiana, M. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kelurahan Lappa Sinjai Utara. *The Journalish: Social and Government*, 4(3), 257-262.
- Harahap, R. N. (2023). Analisis dampak sosial dan ekonomi pada program pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1), 289-299.

- Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(1).
- Hasanah, D. I., & Jannah, F. R. D. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Program Pos Pelayanan Tepat Guna (Posyantek) Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jisipol | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1).
- Islamiyati, D., & Restuti, D. P. (2024). Telaah Ekonomi Islam mengenai Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Pra Sejahtera di Margoyoso Pati. *OECOMICUS Journal of Economics*, 8(2), 86-101.
- Karimah, S. (2023). Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 304-313.
- Mahapatro, M., Gonzales-Hyde, D., & Durham, A. M. (2025). A Match Made in Heaven? A Critique of the World Development Report: Migrants, Refugees and Societies. *Progress in Development Studies*, 25(2), 123-139.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mokodompit, N. E. (2019). Kajian Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bonebolango. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 2(2), 111-132.
- Nata, A. A. L., & Riani, N. (2024). Efek Bantuan Sosial Dalam Membantu Kemakmuran Masyarakat Kurang Mampu Pada Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu*.
- Patimbangi, A., & Amir, M. (2025). Dampak Transformatif Bantuan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 12-12.

- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893–1907.
- Septiana, A., Dzaki, A. K., & Sanjaya, V. F. (2024). Pengaruh Program Bantuan Sosial Terhadap Kebahagiaan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus pada Program PKH di Kabupaten Pringsewu, Lampung. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1199–1212.
- Sidik, A., & Rianas, G. N. (2022). Analisis pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan (pkh) di desa toman kecamatan tulung selapan kabupaten ogan komering ilir dalam perspektif ekonomi islam. *Adl Islamic Economic*, 3(2), 143–154.
- Smith, C. (2025). Normalizing doubt: AI, democratic confidence, and the OECD trust framework. *AI & SOCIETY*, 1–11.
- Sumakul, Y. E., Kerebungu, F., & Salem, V. E. (2025). Pemanfaatan Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 2(5), 596–605.
- Wahyuni, D., & Dinaloni, D. (2023). Dampak Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Perekonomian Keluarga Di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)*, 6(2), 092–103.